

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak asasi manusia: Teori, perkembangan dan pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Efendi, Jonaedi. 2022. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Edisi kedua*. Jakarta: Prenada Media.
- Endrik, S. 2017. *Dasar-dasar ilmu hukum*. Malang: Setar Press.
- Gunakaya, Widiada. 2019. *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Iman, Aulia Sholichah. 2021. *Pengawasan pelayanan publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Bunga Media.
- LBH Masyarakat. 2019. *Buku saku hak atas kesehatan*. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Mertokusumo, S. 2019. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Peter, & Siswosebroto, Koesriani. 1988. Hukum dan perkembangan hukum. Dalam A. Podgorecki & C. J. Whelan (Eds.), *Pendekatan sosiologis terhadap hukum* (hlm. ...). Jakarta: Sinar Harapan.
- Pramukti, Angger Sigit. 2016. *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ruyatnasih, Y. 2017. *Manajemen: Teori, fungsi dan kasus*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Setiawan, Endrianto Bayu. 2023. *Hukum hak asasi manusia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Setiawan, Irfan. 2024. *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. Bandung: CV. Rtujuh Media Printing.
- Sholichah, Aulia Iman. 2021. *Pengawasan pelayanan publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Serlika Aprita. 2020. *Hukum dan hak asasi manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wuryaningsih, Emi Wuri, dkk. 2020. *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa 1*. Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH:

Daulay, Wardiyah. 2021. Kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa: *Systematic review*. *Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, Volume 9 Nomor 1. Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Della, Syahbana. 2022. Perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di rumah singgah. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Didi, D. 2018. Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4 Nomor 4.

Jayanti, Nina. 2019. Mekanisme pengawasan terhadap produk hukum dalam konstruksi politik hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 4 Nomor 2. Fakultas Hukum STIH Tambun Bungai, Palangka Raya.

Layuck, Kezia M. 2020. Pengawasan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah pusat menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, Volume 8 Nomor 3. Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

Murthada. 2022. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 4.

Nasrianti, R. 2017. Stigma dan dukungan keluarga dalam merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Jurnal ...*, Volume 15 Nomor 1. (*Catatan: Nama jurnal tidak disebutkan, harap ditambahkan untuk kelengkapan*)

Reza, Darmawan, & Ignatius, A. 2019. Efektivitas kebijakan Dinas Sosial dalam menanggulangi PMKS khusus ODGJ terlantar di Kota Batu. Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.

Rissa, T. V. 2023. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 42 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 77.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI:

Adityawarman. 2018. *Perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Supriedi. 2024. *Analisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi di Kabupaten Blora* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung), hlm. 16.

Yusuf, Arie Adityo. 2022. *Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam program pelayanan masyarakat berstatus lansia di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.